

KULTUR MINORITAS DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Deden Makbuloh

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
deden_makbuloh@yahoo.co.id

Abstract

Minority is a concept that implies discrimination; and it's absolutely in contrast to the ideals of the nation that has been formulated in the 1945 Indonesian Constitution. As long as the use of this concept of minority is at the opposite of the majority, the problem of humanity will could never be resolved properly. Because, the term of minority, in any field, is very strongly colored of discriminatory meaning. Here, author argues that one of the platform to solve such problems of minorities is through understanding of the values developed in Islamic education. Islamic education growing in the modern era is basically aimed at building a just, prosperous, and high dignity of people and society; and all human being are placed in the same position as the servant of Allah the almighty. So, any society with all their characters engage in the same position of a subject in education. Thus, human empowerment in the Islamic education paradigm has to be carry out in a fair way without any separation and discrimination between minority and majority.

Abstrak

Minoritas merupakan konsep yang mengandung makna diskriminatif yang sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam UUD 1945. Selama konsep minoritas digunakan sebagai lawan kata mayoritas, maka selama itu pula masalah kemanusiaan tidak akan terselesaikan dengan baik, sebab, dalam bidang apapun sebutan minoritas kental dengan makna diskriminatif. Salah satu platform untuk mengatasi problem minoritas di Indonesia menurut penulis adalah melalui pemahaman nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang berkembang di era modern pada dasarnya memiliki sasaran pada pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Semua manusia ditempatkan dalam kedudukan yang sama sebagai hamba Allah swt. Masyarakat

dengan segala cirinya menempati posisi sebagai subjek dalam bidang pendidikan. Karenanya, pemberdayaan manusia dalam paradigma pendidikan Islam harus dilakukan dengan cara adil; tanpa memisahkan antara minoritas dan mayoritas.

Kata Kunci: *pendidikan Islam, minoritas, perspektif, pembaharuan*

A. Pendahuluan

Setiap komunitas masyarakat memiliki kultur tersendiri yang diwujudkan atas dasar keyakinan dan cita-cita masyarakat tersebut. Perkembangan kultur masyarakat memiliki akar sejarah yang panjang yang terus dilestarikan. Salah satu cara melestarikan kultur masyarakat adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan tersebut kultur masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat memajukan kehidupan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah urusan hidup manusia.¹ Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat. Misalnya dalam bidang ilmu komunikasi, manusia memperoleh berbagai akses kehidupan dan fasilitas hidup manusia. Hal ini terbukti dengan adanya kemajuan bidang komunikasi antar budaya; antar personal. Hubungan antar manusia yang berjauhan letaknya dapat dipermudah dengan adanya alat komunikasi canggih sebagai temuan ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses-proses pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan formal memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan terdokumentasikan dengan baik. Adapun pendidikan informal berjalan secara alamiah, dan cenderung bergerak bebas. Namun demikian kedua bentuk pendidikan tersebut telah nyata dampaknya dalam mendukung lajunya perkembangan peradaban suatu masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran menuju kehidupan masyarakat yang berilmu akan terus bergulir. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu, pola pendidikan perlu memperhatikan dinamika perkembangan suatu

¹Anna Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat* (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 59.

masyarakat.

Ironis, jika sistem pendidikan benar-benar belum bertanggung jawab. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Indonesia sejak kekuasaan Orde Baru tumbang pada Mei 1998 hingga saat ini, arah pendidikan dengan berbagai perangkatnya masih dalam keadaan yang tidak menentu.² Lebih dari itu, memang banyak hal yang menjadi program dalam era reformasi secara menyeluruh dan komprehensif belum menunjukkan adanya tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Banyak aturan lama yang dipandang tidak lagi relevan dan sudah mulai ditinggalkan. Sementara aturan baru sebagai penggantinya yang diharapkan dapat merubah keadaan yang lebih baik, belum berhasil dirumuskan. Padahal, masyarakat sudah tampak membutuhkan keberpihakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang riil dihadapi oleh masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan, UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 13, secara eksplisit sudah menyebutkan bahwa jalur pendidikan formal, non formal dan informal dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dalam hal ini, jelas kedudukan jalur-jalur pendidikan berdiri secara seimbang bahkan saling melengkapi. Tidak mungkin dapat saling melengkapi kalau salah satu diantaranya tidak diberdayakan. Artinya, sisi masyarakat perlu diberdayakan. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Jika pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, maka pendidikan nasional juga akan baik secara keseluruhan. Pada gilirannya kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia akan baik.

Logika berpikir di atas, dalam realitasnya tidak mudah terwujud. Sebab ternyata banyak sekat-sekat yang mengelompokkan masyarakat secara tidak adil. Istilah pendidikan Islam dan pendidikan umum seringkali dipertentangkan; istilah masyarakat minoritas dan mayoritas dipertarungkan. Akibatnya, terjadi gesekan-gesekan tidak sehat, persaingan merebut pengaruh yang tidak akademis. Perjuangan kelompok minoritas melawan

²Azyumardi Azra, *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1.

arogansi kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas menindas kelompok minoritas. Konflik horizontal terjadi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Sampai kapan problematika minoritas akan terus bergulir?

Tulisan ini merupakan ikhtiar untuk merajut benang kusut yang sering menyelimuti paradigma manusia yang keliru. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi dan memetakan konsep-konsep antidiskriminatif yang terselubung dalam terminologi minoritas melalui perspektif pendidikan Islam. Perspektif ini yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah minoritas.

Metode pembahasan menggunakan studi kasus dalam pendekatan kepustakaan. Kasus-kasus yang terekam dalam berbagai literatur dianalisis kritis sehingga ditemukan pola pemikiran yang mencerahkan masa depan bangsa yang multietnis dan beragam pemikiran. Keragaman itu dipercantik sebagai ujian keadilan suatu bangsa, menuju Indonesia yang berkeadilan dan berpihak pada kebenaran; bukan melanggengkan kekuasaan dengan cara menindas dan memarginalkan kebenaran.

B. Problematika Minoritas

Definisi minoritas seringkali dikonfrontasikan dengan definisi mayoritas, seperti yang ditulis Oman Fathurrahman dalam pendekatan otoritas keagamaan³ yaitu bahwa kaum minoritas selalu berada dalam posisi marginal, diidentikkan sebagai lawan kaum mayoritas. Hal ini terjadi bukan hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam aksi. Bahkan, jauh lebih kental dalam pendekatan politik demokrasi. Suara terbanyak itu yang dinyatakan benar, berlaku dan menjadi keputusan. Oleh sebab itu, kaum minoritas selain merasa dimarginalkan juga merasa ditindas oleh kaum mayoritas.

Kaum mayoritas selalu menjalin kesatuan dengan kekuasaan, yang selanjutnya melakukan penolakan dan

³ Oman Fathurrahman, "Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XI, No. 2, Desember 2011, h. 448.

marginalisasi terhadap kecenderungan heterodoksi.⁴ Penolakan-penolakan seringkali terjadi pada tingkat represif dari pihak mayoritas kepada minoritas. Dengan demikian, kaum minoritas sepanjang jalan hidupnya berhadapan dengan problematika kekuasaan. Protes terus digulirkan seperti bola salju yang tidak pernah berhenti menggelinding ke berbagai bidang kehidupan manusia. Akibatnya, lambat laun kaum minoritas menggalang dukungan agar kelak menjadi mayoritas. Setelah menjadi mayoritas tentu akan ada minoritas-minoritas lainnya. Demikian seterusnya, sehingga tidak pernah selesai problematika minoritas dalam realitas seperti tersebut di atas.

Dalam sejarah, problematika minoritas pernah mengemuka, misalnya pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah, khususnya zaman al-Ma'mun yang akan penulis uraikan. Situasi politik pada waktu al-Ma'mun naik dalam pemerintahan diperoleh melalui persaingan ketat dengan kelompok pendukung al-Amin dari keturunan bangsa Arab. Al-Ma'mun sendiri walaupun masih dalam keturunan Arab, namun dilahirkan dari seorang ibu berdarah Persia. Karenanya, pendukung al-Ma'mun mayoritas berasal dari kelompok minoritas etnis Persia atau kalangan non-Arab secara umum yang biasa disebut *mawālī* 'kaum pendatang'.

Kemenangan al-Ma'mun melawan al-Amin merupakan awal kemenangan kaum *mawālī*, yang sebelumnya selalu menjadi kelas nomor dua.⁵ Dengan demikian, masa al-Ma'mun merupakan awal berubahnya struktur politik dalam pemerintahan. Jika kelompok *mawālī* sebelumnya selalu ditempatkan sebagai kelompok minoritas kelas dua, bahkan dimarginalkan dan selalu ditindas, sehingga tidak memiliki ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah yang berkuasa, maka setelah berafiliasi dengan kemenangan kekuasaan, mereka pun eksis dan masuk dalam struktur pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, ada perubahan pandangan terhadap kelompok *mawālī* yang kemudian berkolaborasi dengan kelompok keturunan Arab.

⁴ *Ibid.*, h. 451

⁵ Syed Mahmudunnasir, *Islam It's Concept and History* (New Delhi: Kitab Bhavan, tt.) h. 186.

Kondisi sosial pada masa al-Ma'mun sangat kompleks. Kompleksitas sosial dari berbagai unsur kehidupan yang berbeda-beda bersatu dalam agama dan negara. Mereka berasal dari berbagai kawasan seperti Afrika Selatan, Mesir, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, Sind, dan Turki.⁶ Kehidupan sosial demikian ternyata tidak lepas dari masih kuatnya fanatisme ras dan kebangsaan. Hal ini memberikan pengaruh praktis terhadap berbagai segi kehidupan sosial.

Secara positif, beragamnya kehidupan sosial dapat memberikan ruang yang luas untuk mengenal berbagai watak dari tiap-tiap bangsa. Karena dalam beberapa hal, setiap bangsa memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa tersebut. Hal ini dapat mendorong khalifah dan umat Islam untuk melakukan pengenalan dan penyelidikan lebih dalam mengenai kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa tersebut.

Selain memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun juga telah mewariskan budaya pembauran antara keturunan Arab dan Non Arab. Pembauran ini pada gilirannya dapat memberikan kontribusi dan kekuatan tersendiri untuk membangun kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadi harapan khâlifah al-Ma'mun.

Struktur pemerintahan al-Ma'mun yaitu khalifah tetap dari keturunan Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima dan pegawai banyak diangkat dari golongan *mawālī* keturunan Persia.⁷ Jadi, secara internal telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik pemerintahan yang melibatkan orang Persia dengan menggeser kabilah Arab. Orang-orang Persia menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, bahkan diberi kepercayaan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Adanya legalitas formal bangsa *mawālī* (non-Arab) dalam percaturan pemerintahan, semakin menumbuhkan kehidupan politik yang beragam dan kompleks. Bangsa keturunan Arab yang tadinya merasa berhak mengatur pemerintahan karena dekat dengan keturunan Nabi Muhammad, kini makin memudar.

⁶A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h. 278.

⁷*Ibid.*, h. 211

Sedangkan di pihak lain, orang-orang Persia merasa telah berjasa dalam memenangkan khâlifah al-Ma'mun dan telah memiliki peradaban yang lebih maju sehingga dipandang cakap, terutama dalam ilmu, filsafat dan sastra yang menjadi dasar-dasar penting dalam mengatur pemerintahan.⁸ Dengan demikian, kondisi politik pada masa al-Ma'mun lebih didominasi oleh orang-orang Persia. Persia merupakan daerah perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan. Dalam kondisi ini pula, pemerintah mementingkan sistem pendidikan sebagai cikal bakal kemajuan pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam masa pemerintahan Abbasiyah.

Sejarah mencatat, kemajuan Islam zaman klasik dalam sejarah ilmu mencapai puncaknya pada zaman Abbasiyah khususnya masa al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M).⁹ Kemajuan dalam bidang ilmu, dapat berarti kemajuan dalam bidang pendidikan. Artinya, pada zaman klasik pendidikan Islam mengalami kemajuan mencakup berbagai bidang ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Kaum muslimin penuh antusias dan bersikap terbuka mempelajari macam-macam ilmu walaupun dari bangsa luar Arab. Kondisi demikian, melahirkan pusat-pusat ilmu mulai dari istana sampai ke rumah-rumah ulama. Akhirnya, asimilasi kultur dan struktur dapat menopang pranata keilmuan sehingga lahir sosok ilmuwan-ilmuwan besar pada zamannya.

C. Hubungan Pendidikan dan Masyarakat

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan banyak diawali dengan kegiatan pengamatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kondisi bangsa Babilonia yang hidup di daerah Mesopotamia sebagai daerah yang cerah, jarang berawan, malam hari bintang-bintang dan planet tampak jelas telah mendorong mereka untuk melahirkan ilmu astronomi, yang kini menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah.

Pada masyarakat Mesir Kuno sekitar tahun 3200 SM,

⁸Aḥmad Amīn, *Ḍuḥā al-Islām*, Vol. II (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), h. 207.

⁹*Ibid.*, h. 49.

suatu daerah yang rawan banjir dari sungai Nil tiap tahun telah menghapus batas-batas tanah yang dibuat orang, sehingga mendorong tumbuhnya ilmu geometri dan matematik salah satunya sebagai alat untuk mengukur tanah. Pada masyarakat Yunani yang dikenal sebagai pedagang dan pelaut yang suka menjelajah lautan sambil berniaga telah mendorong manusia untuk berkontemplasi sehingga lahir para filosof yang memperhatikan gerak alam semesta seperti Thales, Pythagoras, Demokritos dan Aristoteles.

Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan apa yang dilakukan masyarakat lambat laun menjadi bahan kajian di lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, apa yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan kemudian diterapkan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan masyarakat ibarat mata uang yang semua sisi saling memberi arti.

Dalam *Standards for Science Teacher Preparation* yang diterbitkan NSTA tahun 1998 bekerjasama dengan *The Association for the Education of Teachers in Science*, dinyatakan bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah konteks sosial.¹⁰ Para pendidik perlu mengidentifikasi dan menggunakan sumber-sumber belajar dari luar sekolah (*schooling*). Pembelajaran kontekstual ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pembelajar, partisipasi orangtua dan masyarakat di lingkungan sekolah tertentu.

Sejak tahun 2002, Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan suatu pendekatan pembelajaran CTL (*contextual teaching and learning*) sebagai pembelajaran yang mengkaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan bangsa. Hasil CTL dapat meningkatkan prestasi belajar melalui pemahaman makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini hampir setiap kegiatan kehidupan masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan. Sejak bangun

¹⁰Anna Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat*, h. 98.

di pagi hari hingga istirahat kembali di malam hari, tampak adanya nilai pendidikan. Oleh karena itu, sulit dipisahkan antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat. Hanya saja model pendidikan yang bagaimana yang dapat mendidik masyarakat menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban mereka. Sebab, dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak menyatu dengan masyarakat justru menimbulkan macam-macam pendidikan yang tidak mendidik. Tata kehidupan masyarakat banyak yang hancur-hancuran. Oleh karena itu, perlu dihubungkan secara harmonis antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan membutuhkan masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat membutuhkan pendidikan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari dan oleh masyarakat.¹¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat dengan berbagai budayanya yang unik harus dilibatkan dalam ranah pendidikan guna memahami program-program yang dilakukan dunia pendidikan, sehingga mereka termotivasi untuk bisa memberikan kontribusi peran yang maksimal terhadap terlaksananya program-program pendidikan tersebut. Paling tidak kontribusi peran masyarakat yang dimaksud misalnya masyarakat termotivasi untuk memasukkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan. Masalah-masalah yang dihadapi sekolah, madrasah atau perguruan tinggi dapat dipecahkan bersama dengan masyarakat, tanpa memandang kelompok mayoritas atau minoritas, tetapi bersama-sama masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat seperti lapangan olahraga, gedung pertemuan, masjid, bengkel kerja, tempat-tempat kursus keterampilan, sumber daya manusia dan lain sebagainya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan.¹²

¹¹Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Dharma Bakti, 2003), h. 5.

¹²Tim Penulis, *Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah Mandiri* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Keagamaan, 2001), h. 102-104.

Dalam Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1, butir 10 misalnya dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia dan diadakan serta didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.¹³ Namun demikian, karena sifat dan kemauan politik pemerintah yang lebih kuat dan sentralistis, maka peran serta masyarakat dalam menangani masalah pendidikan tersebut kurang diberikan tempat yang proporsional. Hal ini terjadi akibat pemahaman keliru tentang masyarakat di dalam persepektif pemerintah.

Hubungan pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat sosial. Berbagai komponen pendidikan, seperti visi, misi, tujuan, dasar, kurikulum, metode, pendidik yang dibutuhkan, evaluasi, lulusan, sarana dan prasarana pendidikan perlu dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini pendidikan merupakan proses sosial. Karena itu, pendidikan dalam suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri.¹⁴

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Ia ditimbulkan dari dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah “pakaian” yang perlu diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.¹⁵ Sejalan dengan

¹³ *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 3.

¹⁴ Ali Khafīl Abū al-’Ainain, *Falsafah at-Tarbiyah al-Islāmiyyah fi al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabi, 1980), h. 51.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran WahyudalamKehidupan Masyarakat*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 992), h. 173.

itu Ibnu Khaldūn pernah berkata bahwa sesungguhnya ilmu dan ajarannya itu merupakan amal sosial yang khusus ditujukan kepada manusia, karena memang keduanya berada di dalam kehidupan peradaban umat manusia, yang dalam kehidupan primitif tidak terwujud.¹⁶

Dalam konteks sosial, pendidikan mampu merajut hubungan harmonis yang dapat saling melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya; antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; antara mayoritas dan minoritas. Pemahaman ini perlu diperdalam dan diperluas dalam kajian-kajian ilmiah sehingga dapat menghilangkan dikotomi, diskriminasi, dan represi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di Indonesia. Kehidupan masyarakat menjadi familier dan terhayati dalam kehidupan setiap manusia yang saling *asah*, *asih* dan *asuh*.

Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan di samping membekali komunitasnya dengan penguasaan materi bidang studi tertentu juga memberikan pemahaman tentang kaitan antara materi dan dunia nyata yang tumbuh dalam masyarakat yang kompleks. Dengan demikian, pembelajaran baik formal di sekolah maupun informal di masyarakat dapat memberi pengalaman bagi semua pihak sebagaimana dalam rekomendasi UNESCO 1996, *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*. Pendidikan dalam pemahaman yang Islami bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari proses memberi dan menerima.

Yusuf al-Qardhawi, dalam konteks mengkaji keberhasilan pendidikan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan Jama'ah Ikhwanul Muslimin yaitu suasana kebersamaan yang positif yang dibina jama'ah.¹⁷

¹⁶ Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 218. Bandingkan dengan Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam, Suatu Analisa Sosio Psikologi*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985), h. 218.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna* terj. Bustami A. Gani (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 11

D. Perspektif Pendidikan Islam tentang Kultur Minoritas

Pada dasarnya, belajar mempunyai tujuan agar pembelajar dapat meningkatkan mutu hidupnya sebagai makhluk Allah baik individu maupun sosial. Sebagai individu seseorang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghadapi segala tantangan yang menghadang. Dalam keadaan apapun dan dimana pun tetap eksis sebagai individu yang berkepribadian islami. Belajar merupakan bekal penting bagi seorang individu agar mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih baik. Dengan demikian, individu pun mendapat tempat yang terhormat dalam pendidikan Islam, apalagi kelompok (minoritas). Oleh sebab itu, dalam perspektif pendidikan Islam, minoritas tidak boleh dipersalahkan, bahkan sebaiknya diberdayakan.

Jika dihubungkan dengan kehidupan suatu kelompok etnis maupun masyarakat tertentu, implementasi pendidikan Islam dalam kelompok masyarakat, bukanlah hal baru. Sejarah Islam telah mencatat, bahwa dengan panggilan iman yang mengharuskan setiap orang berilmu mengamalkan ilmunya telah mendorong timbulnya inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang amat bervariasi. Pada masyarakat Islam, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada abad VII M hingga abad XV M. Kegiatan intelektual berawal di kota Baghdad masa Hārūn ar-Rasyīd (786-809 M) sebagai pusat perdagangan sehingga tempat berkumpul komunitas masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Mereka saling berinteraksi dan bertukar pikiran sehingga ilmu pengetahuan cepat berkembang.

Lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat tertentu telah diidentifikasi oleh Aḥmad Syalabi misalnya dengan menyebutkan lembaga-lembaga pendidikan itu antara lain: *al-kuttāb* (TPA), *al-qaṣr* (istana), *ḥawānīt al-warrāqīn* (toko buku), *manāzil al-'ulama'* (rumah ulama), *al-bādiyah* (perkampungan udik baduwi), dan *madrāsah*.¹⁸ Ḥasan 'Abd 'Al yang melakukan penelitian khusus mengenai

¹⁸ Aḥmad Syalabi, *at-Tarbiyah al-Islāmiyah, Nuḥumuhā, Falsafatuhā wa Tārīkhuhā* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1987), h. 43.

institusi pendidikan Islam abad IV H menambahkan antara lain: masjid, *aş-şālūn al-adabiyah* (sanggar sastra), *daur al-kutub* (pusat buku/perpustakaan) dan *daur al-'ilm* (pusat pengetahuan, semacam lembaga sekolah).¹⁹

Manāzil al-'ulama' yang secara harfiah berarti rumah kediaman para ulama, juga digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan dengan menggunakan sistem sorogan, yakni seorang pelajar satu persatu menghadap ulama untuk membacakan kitab yang sedang dikajinya. Memang sudah sejak zaman Nabi Muhammad saw. dikenal tempat kegiatan pendidikan berupa *Dār al-Arqām* 'Rumah al-Arqam', tempat di mana pertama kali Rasulullah saw. bertindak sebagai pendidik, memberikan pendidikan Islam bagi para sahabatnya.

Demikian pula *bādiyah* yang diartikan secara harfiah berarti padang pasir, dusun tempat tinggal Badawi. Dalam komunitas lembaga ini bahasa Arab asli dipelajari dan dipelihara keasliannya. Mereka masih tetap mempertahankan kefasihan berbahasa Arab dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Dengan demikian, *bādiyah* merupakan sumber pengajaran bahasa Arab yang asli dan murni. Hal ini tumbuh dalam kelompok masyarakat yang minoritas, namun sangat bermakna dalam proses pembelajaran.

Tempat lainnya yang digunakan masyarakat untuk belajar adalah toko-toko kitab. Para pemilik toko kitab, ternyata bukanlah orang-orang yang semata-mata mencari keuntungan dan laba, tetapi kebanyakan mereka adalah sastrawan-sastrawan yang cerdas, yang telah memilih usaha sebagai pedagang kitab tersebut, agar mereka mendapat kesempatan yang baik untuk membaca dan menela'ah serta bergaul dengan para ulama dan pujangga-pujangga. Mereka juga menyalin kitab-kitab yang penting dan menawarkan kepada mereka yang memerlukannya dengan mendapat imbalan.

Selain itu, pendidikan juga dilakukan oleh masyarakat di dalam sanggar-sanggar sastra, yaitu suatu majlis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Forum sastra tersebut tidak hanya membahas dan

¹⁹Hasan Abū al-'Al, *at-Tarbiyah al-Islāmiyyah fi Qarn ar-Rābi' al-Hijrī* (Kairo: t.np, 1978), h. 219.

mendiskusikan masalah-masalah kesusasteraan saja, melainkan juga berbagai macam ilmu pengetahuan (majelis ilmu pengetahuan) dan berbagai kesenian (majelis kesenian).

Selanjutnya masyarakat juga menggunakan rumah sakit sebagai tempat belajar. Rumah sakit tersebut, bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan keperawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembanglah ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Rumah sakit ini juga merupakan tempat praktikum dari sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Tidak jarang pula sekolah-sekolah kedokteran tersebut didirikan tidak terpisah dari rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam, juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan.

Tempat pendidikan lainnya adalah *al-qasr* (istana), yang secara khusus digunakan untuk mendidik anak-anak para pejabat. Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah dewasa. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kuttab pada umumnya. Di istana orang tua murid (para pembesar istana) adalah yang membuat rencana pelajaran tersebut selaras dengan kecerdasan dan bakat anaknya serta tujuan yang dikehendaki oleh orang tuanya. Pendidik yang mengajar di istana disebut *mu'addib* (pendidik) yang tugas utamanya selain mewariskan kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan orang dahulu kepada anak-anak pejabat juga mendidik agar mereka memiliki budi pekerti yang mulia.

Selanjutnya *al-maktabah* (perpustakaan) juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Para ulama dan sarjana dari berbagai macam keahlian, pada umumnya menulis buku dalam bidang masing-masing dan selanjutnya untuk diajarkan atau disampaikan kepada para penuntut ilmu ketika mereka datang ke istana. Bahkan para ulama dan sarjana tersebut memberikan kesempatan kepada para penuntut ilmu untuk belajar di perpustakaan pribadi mereka.

Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang amat bervariasi tersebut membuktikan dengan jelas bahwa sejak dahulu, pemerintah dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya telah berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat betul-betul telah membangun kerjasama sinergi yang kompak dalam memajukan kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*), pendidikan seumur hidup (*long life education*), pendidikan demokratis yang ditandai dengan adanya program yang disesuaikan dengan kesanggupan dan keinginan masyarakat, dan adanya otonomi yang luas bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan.

Keterlibatan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melakukan pendidikan juga dapat dijumpai pada masyarakat Islam di Indonesia. Jauh sebelum pemerintah mendirikan sekolah atau madrasah formal sebagaimana yang dijumpai sekarang ini, umat Islam di Indonesia sudah memiliki Surau, *Meunasah*, Rangkang, Langgar, Mushalla, Majelis Ta'lim, Masjid, dan Pesantren. Lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan dibangun atas dasar kemauan dan kesadaran masyarakat sendiri, dan digunakan selain untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan juga untuk kegiatan pendidikan.²⁰ Hasil pendidikan di lembaga-lembaga tersebut lahirnya sosok-sosok ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama, keluasaan wawasan dan pengalaman, serta kepribadian yang unggul, sehingga mampu tampil sebagai pemimpin umat.

Menurut Ziauddin Sardar, intelektual muslim adalah muslim terdidik yang memiliki akses khusus kepada nilai-nilai budaya, sehingga dapat mengambil posisi kepemimpinan.²¹ Hal ini tidak lahir dari kelompok mayoritas, tetapi malahan dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam yang diutamakan adalah kemampuan dan kompetensi-kompetensi keilmuan. Kemajuan sains di dunia Islam pada zaman klasik yang

²⁰ Abuddin Nata (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 100.

²¹ Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilization* (London: Croom Helm, 1979), h. 67.

mampu memimpin peradaban dunia karena segelintir orang-orang tertentu melakukan pengembaraan intelektual ke berbagai kota dan negara. Mereka menemui pendidik yang ahli di bidangnya, menerjemahkan buku-buku sains, mengomentari dan membuktikan dengan eksperimen sendiri. Di samping itu melakukan modifikasi dan penemuan baru dari ilmu yang ditekuninya. Misalnya, penemuan angka nol (*ṣifr*) yang berarti kosong yang sangat berharga dalam ilmu hitung, ilmu aljabar, sampai sekarang namanya masih menggunakan bahasa aslinya yang ditemukan oleh al-Khawārizmī (780-847 M). Di Eropa, sampai abad ke enam belas buku al-Jabar dijadikan buku wajib di sekolah-sekolah dan universitas. Penemuan struktur angka Arab yang lebih praktis, seperti memakai satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan yang ada di Romawi sebelum Islam yaitu angka 383 misalnya, ditulis CCCLXXXII.²² Demikian pula dalam ilmu kedokteran. seperti ar-Rāzi (865-925 M), Ibnu Haiṣam (965-1039 M), dan Ibnu Sīnā (980-1037 M).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia sebenarnya karena ada kelompok kecil masyarakat yang mengembangkannya. Beberapa bukti dapat dikemukakan bahwa kemajuan suatu ilmu dan suatu bangsa karena seseorang ahli tertentu yang menekuninya dengan ciri khasnya. Imam Bukhari (w. 870 M) ahli hadits termasyhur untuk mengumpulkan hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ*, mula-mula ia mengumpulkan hadis yang ditemui dalam negerinya sendiri. Kemudian ia pergi ke Balkh untuk mendengarkan hadis-hadis dari ahlinya. Sesudah itu pergi ke Marwa, Naisabur, Rayy, Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Damaskus, Qaiṣariyah, ‘Asqalan, dan Homs. Pada tiap-tiap negeri itu dikumpulkan beberapa hadis. *Rihlah* tersebut memakan waktu sekitar 16 tahun, kemudian ia kembali ke tanah airnya.²³ Imam Bukhari waktu berumur 16 tahun sudah hapal kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Abdullāh ibn al-Mubārak

²² As-Sayyid Aḥmad Ibrāhīm Ḥammūr, *Al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah* (Kairo: Al-Azhar Universitas Press, 2003), h. 273.

²³ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h. 125.

dan Wakī', dua tokoh ahli hadis terkemuka pada waktu itu.²⁴ Ibunya mengantarkan ia ke Makkah untuk mendalami hadits dari tokoh-tokoh ahli hadis seperti al-Wāḥid al-Azraqi dan Isma'il ibn Sālim al-Sā'ig. Kemudian pergi ke Madinah untuk belajar hadis kepada anak cucu shahabat nabi. Kemudian menjelajahi negeri-negeri lain dan beberapa kota untuk menemui para pengajar hadis. Sekarang semua umat Islam mengenal sosok Imam Bukhari dan mengakuinya sebagai ahli hadis yang sangat berguna bagi suatu bangsa dan negara.

Imam Syafi'i (767-820 M) seorang ahli fikih, namanya besar bukan karena mayoritas masyarakat pada saat itu, tetapi sosok manusia yang langka. Guru-guru Imam Syafi'i terdiri dari ulama Mekkah, Madinah, Irak dan Yaman.²⁵ Ia pergi ke kabilah Huzail di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih selama 10 tahun bermukim, seraya mempelajari kehidupan orang desa dan orang kota. Ia hidup bergaul dengan suku-suku Badui, sehingga pengetahuan syair-syair Arab sangat mendalam. Imam Syafi'i selama 17 tahun lamanya belajar bahasa di Badiah Hudzail.²⁶ Ia melakukan *mudārasah* dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Ia dapat menghafal *al-Muwatta'* pada usia 13 tahun. Selama ia belajar di Madinah, sering melakukan perjalanan ke kota-kota untuk mempelajari keadaan masyarakat dan kehidupannya. Ia pelajari fikih Irak dan membaca buku Muhammad ibn Hasan dan belajar kepadanya secara langsung.²⁷ Ia kembali lagi ke Mekkah dengan membawa fikih Irak. Di Masjid al-Haram, ia mengembangkan fikih Madinah (*ahl al-ḥadīṣ*) dan fikih Irak (*ahl ar-ra'yi*) selama 9 tahun bermukim. Kemudian ia pergi ke Bagdad yang merupakan tempat berkumpulnya ulama *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl ar-ra'yi*.

Sampel lain, Aḥmad ibn Ḥanbal (780-855 M) berguru pada Imam Syafi'i secara individual. Kemudian berguru kepada Sufyān

²⁴ Ḥāji Khalifah, *Kasyf az-Zunūn 'an Asāmī al-Kutub wa al-Mutun* (Beirut: Dār al-'Ulūm al-Ḥadīṣah, t.t.), h. 541.

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 39.

²⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 90.

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas*, h.36.

ibn ‘Uyainah, tokoh ahli Mazhab Hijaz.²⁸ Sejak kecil Ahmad ibn Hanbal belajar kepada guru-guru yang ada di Baghdad. Setelah umur 16 tahun, ia berangkat menuntut ilmu ke luar kota dan ke luar negeri, seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah.²⁹ Setelah umur 16 tahun, barulah ia berangkat menuntut ilmu ke luar kota dan ke luar negeri, seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah.³⁰ Pada tiap-tiap kota yang didatangi, tidak segan-segan beliau belajar kepada para syekh, terutama dalam bidang hadis. Setiap kali mendengar pada suatu kota dan tempat ada ulama yang ahli dalam ilmu hadis, dengan cepat beliau berangkat menuju kota tersebut untuk belajar dan mendalami ilmu tersebut. Dengan demikian, pendidikan yang ditempuh tidak secara mayoritas, tetapi kontribusinya besar dalam mengubah kultur masyarakat.

Muhammad Ibnu Sa’ad (168-230 H/784-845 M) yang lahir di Bashrah dan wafat di Baghdad adalah seorang ahli hadis dan sejarah. Ia belajar berbagai ilmu pengetahuan keagamaan kepada banyak pendidik, kemudian belajar khusus pada al-Wāqidi.³¹ Ia seorang yang kuat hapalan, menguasai banyak ilmu hadis dan sejarah dengan mendalam.

Ishāq al-Mūṣili (767-850 M) seorang penyanyi yang paling terkenal pada masa al-Ma’mun, suatu ketika menghadiri majlis Yahyā ibn Akṣam, dan mendebatnya. Dalam berbagai pertemuan di istana, dia duduk bersama para ulama dan sastrawan. al-Ma’mun pernah berkata: “Jika Ishāq al-Mūṣili belum terlanjur terkenal sebagai penyanyi yang ulung di kalangan manusia, maka aku akan mengangkatnya sebagai *qāḍī*’.”³²

Pada masa al-Ma’mun, Baghdad menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri dunia, kota ilmu dan budaya paling masyhur. Al-Ma’mun betul-betul mendorong umat Islam untuk

²⁸ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Bandung: Pustaka Firdaus, 2003), h. 110

²⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 252.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Badri Yatim, *Historiografi Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 88.

³² Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam* (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 80.

ikut serta dalam kehidupan yang menggabungkan dimensi ilmiah dan ruhaniah. Dialah yang memajukan gerakan pemikiran dan mengembangkan ilmu lebih serius dengan menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Dia menganjurkan diadakannya pertemuan mingguan di istananya yang dihadiri oleh ulama yang mau berdiskusi dan bertukar pikiran. Dia mengirimkan beberapa utusan untuk pergi ke Konstantinopel, Sicilia dan tempat lainnya untuk mendapatkan manuskrip kuno. Manuskrip tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang pakar beragama Nasrani yang menguasai bahasa Yunani dan Suryani, yaitu Ḥunain ibn Ishāq (809-873 M). Hunayn memperoleh gaji bulanan sebesar 500 dinar yang disamakan dengan timbangan emas untuk buku yang diterjemahkan. Sejalan dengan itu, Baitul Hikmah sebagai pusat buku dan terjemahan lebih serius dikembangkan pada masa al-Ma'mun.³³

Aktivitas keilmuan pada masa al-Ma'mun mencapai masa keemasan dalam sejarah kemajuan Islam, karena khâlifah sendiri seorang ulama besar. Majlis al-Ma'mun penuh oleh para ahli ilmu, ahli sastra, ahli kedokteran, dan ahli filsafat. Mereka diundang oleh al-Ma'mun dari segala penjuru dunia yang telah maju. Terkadang, al-Ma'mun sendiri berperan aktif dalam berdiskusi dan berdebat dengan para ahli tersebut.³⁴

Menurut Nasr, kemajuan intelektual yang menghasilkan peradaban Islam yang tinggi pada abad pertengahan, tidak lain disebabkan adanya pandangan kesatuan dalam keseluruhan ajaran Islam.³⁵ Dalam bukulain, Nasr mengatakan: "*Both islamic education and islamic sciences are related in the most intimate manner to the principles of the islamic revelation and the spirit of the Quran*".³⁶ Kemenangan umat Islam di Asia Tengah, India Timur, Afrika dan Eropa Barat mempunyai pengaruh yang besar dalam memperluas

³³ W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia; Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*, terj. Hendro Prasetyo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 97.

³⁴ Yunus, *Sejarah Pendidikan*, h. 88.

³⁵ Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (New York: New American Library, 1968), h. 24-25.

³⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in The Modern World* (London and New York: Keagen Paul, 1987), h. 122.

intelektual para pencari ilmu. Umat Islam dapat belajar dari bangsa-bangsa lain dalam bidang ekonomi, sosial, situasi politik di daerah-daerah tersebut, kemajuan perdagangan dan industri.³⁷ Menurut Hasan, tradisi rihlah ilmiah sudah berjalan sejak khâlifah Hārūn ar-Rasyīd, misalnya murid muslim mengadakan perjalanan sejauh India, Srilangka, Semenanjung Malayasia dan Cina, bahkan sejauh Korea melalui laut.³⁸

Tokoh-tokoh yang muncul dalam sejarah adalah mereka yang kritis, berani, dan tegas dalam ilmu yang diyakininya benar. Mereka yang menjalani pendidikan Tinggi di lembaga-lembaga formal melakukan hal tersebut karena kecintaan terhadap kehidupan intelektual. Kehidupan para ilmuwan yang benar-benar tekun dan telah berhasil menguasai ilmunya, terbuka peluang untuk maju menjadi *mufti*, menjadi penasihat, atau *tutor* di rumah hartawan.³⁹

Pada masa Nabi Muhammad, pendidikan tumbuh dari suasana kesucian jiwa beliau dan para sahabat, suasana yang menunjukkan loyalitas dan ambisi mereka terhadap ilmu, suasana yang mampu melahirkan keutamaan untuk orang yang memiliki kemuliaan dan memelihara kehormatan. Nabi Muhammad saw. telah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang harmonis. Mereka tidak pernah diliputi kekhawatiran akan dibeda-bedakan. Perbedaan struktur sosial mereka akan terlupakan dengan perlakuan Nabi yang terpuji itu. Mereka tidak pernah lupa dengan perlakuan tersebut dan tidak pernah merasakan adanya penghalang antara mereka dengan beliau. Suatu suasana yang tak pernah melahirkan keseganan untuk selalu melontarkan pujian kepada pendidik yang telah diliputi oleh kecintaan.

Kesucian jiwa para sahabat tidak hanya tampak dari penghormatan mereka terhadap Rasulullah sebagai pendidik mereka, tetapi mereka tampak juga dari adanya sikap saling hormat menghormati dan saling mengutamakan sahabat lainnya. Inilah

³⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), h. 136.

³⁸ *Ibid.*, h. 135.

³⁹ Charles Michael Stanton, *Higher Learning in Islam; The Classical Period, A.D. 700-1300* (Savage, MD: Rowman & Little-field Publishers Inc., 1990), h. 57.

suasana keilmuan yang suci dan mereka adalah para pendidik yang sebenar-benarnya. Orang yang menjauhi suasana seperti itu berarti telah menjauhi nilai yang paling berharga yang dirasakan oleh para ulama.

Menurut Ibnu Miskawaih, seorang yang menodai atau memalsukan cinta dan persahabatan lebih busuk daripada orang yang memalsu uang emas atau perak.⁴⁰ Cinta dan persahabatan dalam pandangan Miskawaih merupakan landasan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu pula, hubungan yang palsu akan cepat lenyap, cepat rusak sebagaimana uang emas atau uang perak yang palsu akan cepat rusak dibandingkan dengan yang asli. Oleh sebab itu, seseorang yang berakal pada saat mengupayakan kebaikan, selamanya dituntut menggunakan cara yang sama berdasarkan ketulusan dan hati nurani yang suci.

Hal tersebut menjadi bukti, bahwa masyarakat minoritas telah mampu mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan secara mandiri dengan hasilnya yang unggul. Melalui konsep pendidikan Islam, dapat menumbuhkan kepercayaan dan kreativitas masyarakat dalam mengelola pendidikan. Dengan kata lain konsep pendidikan berbasis masyarakat tersebut pada hakikatnya kembali kepada konsep pendidikan yang pernah dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa membedakan mayoritas atau minoritas. Dengan cara demikian, kreativitas, inovasi, gagasan, keadilan dan demokrasi pendidikan dengan sendirinya akan tumbuh di masyarakat. Di tengah-tengah situasi di mana kemampuan pemerintah amat terbatas, maka konsep pendidikan Islam merupakan strategi yang perlu mendapat dukungan.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang kelompok minoritas sebagai kelompok manusia atau masyarakat yang memiliki keunikan tertentu yang secara positif dapat menjadi pioner dalam melakukan

⁴⁰Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat (Bandung: Mizan, 1997), h. 144.

perubahan-perubahan bangsa. Oleh sebab itu, kelompok minoritas dalam perspektif pendidikan Islam perlu dihubungkan dengan sejarah Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad saw. perlakuan terhadap kelompok sahabat yang jumlahnya sedikit penuh dengan kecintaan, sehingga menjadi para sahabat yang berkualitas dalam pendidikan Rasulullah saw.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kelompok tertentu yang berkualitas dan memperoleh pengalaman, pendidikan yang baik menjadi orang yang memberikan warna kemajuan bangsa. Spirit ini secara fundamental dapat ditemukan pada nilai-nilai keadilan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sangat dijunjung tinggi dalam interaksi dan pergaulan umat manusia. Atas dasar itu, kelompok minoritas bukan untuk dijadikan sebagai lawan yang harus dimarginalkan, melainkan sebagai kelompok manusia yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu sehingga berpotensi menjadi contoh bagi kebanyakan umat manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.
- Ahmad, Husayn, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Rosdakarya, 1995.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Bandung: Pustaka Firdaus, 2003.
- al-'Ainain, 'Ali Khafīl Abū, *Falsafah at-Tarbiyah al-Islāmiyyah fi al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1980.
- al-'Āl, Hasan Abū, *at-Tarbiyah al-Islāmiyyah fī Qarn ar-Rābi' al-Hijrī*, Kairo: t.np, 1978.
- Amīn, Aḥmad, *Duḥā al-Islām*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Azra, Azyumardi, *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Fathurrahman, Oman, “Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol XI, Nomor 2, Desember, 2011.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hasjmi, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Khafīfah, Ḥāji, *Kasyf az-Zunūn 'an Asāmī al-Kutub wa al-Mutun*, Beirut: Dār al-'Ulūm al-Hadīshah, t.t.
- Langgulung, Hasan, *Pendidikan dan Peradaban Islam, Suatu Analisa Sosio Psikologi*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985.
- al-Jumbulati, Ali, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Miskawaih, Ibn. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat, Bandung: Mizan, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*, New York, New American Library, 1968.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Traditional Islam in The Modern World*, London and New York: Keagen Paul, 1987.
- Nata, Abuddin, (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Poedjiadi, Anna, *Sains Teknologi Masyarakat*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Sardar, Ziauddin, *The Future of Muslim Civilization*, London: Croom Helm, 1979.
- Stanton, Charles Michael, *Higher Learning in Islam; The Classical Period, A.D. 700-1300*, Savage, MD: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1992.
- Syalabi, Ahmad, *at-Tarbiyah al-Islāmiyah, Nuẓumuhā, Falsafatuhā wa Tārīkhuhā*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1987.
- Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Watt, W. Montgomery, *Islam dan Peradaban Dunia; Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*, terj. Hendro Prasetyo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.